

BAB II

PERAN DAN FUNGSI NEGARA DALAM ISLAM

A. Fungsi Alokasi Negara

Pengalokasian sumber daya yang merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dipraktikkan sebagaimana pada sumber pendapatan lain. Sumber daya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan generasi mendatang dan tidak boleh berlebihan.¹²

Pengalokasian kebijakan fiskal mencakup sektor individu (*private sector*) dan sektor publik (*public sector*), yang semuanya harus sesuai dengan syariah. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan asasi (*basic needs*) setiap individu, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pada kondisi tertentu, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara wajib menjamin kebutuhan pokok tersebut. Kebutuhan sektor umum (*publik sektor*), pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas masyarakat umum, seperti jalan raya, jembatan, pendidikan, keamanan, dan pertahanan.

Fungsi alokasi negara terwujud ketika negara ingin mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat *daruriyat*, maka negara dapat mengatur pengalokasian

¹² Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, and Gede Putu Agus Susila Jana, 'Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota', *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4.1 (2018), 24–33.(h.26)

sumber daya dengan beberapa jenis negara, misalnya pemerintah melihat pentingnya produksi dan impor untuk barang yang bersifat darurat dan sudah sangat mendesak untuk dipenuhinya permintaan pasar atas barang-barang tersebut. Untuk barang-barang kategori ini pemerintah harusnya memberikan kemudahan dalam pendistribusiannya memberikan keringanan pajak masuk memotong memudahkan mendapatkan baku.¹³

Alokasi optimal sumber daya dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai salah satu keseimbangan antara moral dan perekonomian, alokasi pendapatan, dan keberadaan teknologi. Moral akan menjadi hal yang penting dan diawasi lembaga hisbah, sedangkan pasar akan mencerminkan imperatif ekonomi. Sektor publik tidak hanya melengkapi kegiatan ekonomi tetapi juga bertindak dengan cara membuat hitungan untuk memastikan kinerja yang lebih baik. Fungsi alokasi sektor publik juga akan melibatkan pengeluaran publik untuk mencapai keseimbangan perekonomian.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam kebijakan fiskal, pengalokasian sumber daya harus dilakukan

¹³ Susila Adiyanta, 'Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19', *Administrative Law and Governance Journal*, 3.1 (2020), 162–81. (h.174)

¹⁴ Elfira Maya Adiba and Hanifiyah Yuliatul Hijriah, *Book-5 : Ekonomi Islam (Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, Dan Stabilisasi) Islam Pada Pemenuhan Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan)*, 2015. h.122.

dengan bijaksana dan optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran generasi mendatang. Kebijakan fiskal dalam Islam mencakup sektor individu dan publik, dengan prinsip-prinsip syariah sebagai panduan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan menyediakan fasilitas publik. Alokasi sumber daya yang optimal dalam ekonomi Islam mencakup keseimbangan moral dan perekonomian. Sektor publik berperan penting dalam mencapai keseimbangan ekonomi melalui pengeluaran publik.

B. Fungsi Distribusi

dalam menjalankan fungsi alokasinya, pemerintah dapat mengatur bagaimana alokasi sumber daya ekonomi dapat digunakan secara adil dan efisien, oleh karena itu dengan fungsi distribusi, pemerintah harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.¹⁵

Pilar-Pilar yang harus terpenuhi oleh pemerintah menurut Ahmad dalam Huda, dkk untuk menjalankan fungsi distribusinya, yaitu¹⁶:

1. Supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan

¹⁵ Nunung Nurlaela, 'Analisis Fungsi Distribusi Keuangan Negara (Studi Pemikiran 'Abdul Qadim Zallum)', *Millah*, 15.1 (2021), 1–28.(h.8)

¹⁶ Adiba dan Hijriah. Ibid, h.124

pribadi. kepentingan sosial harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi, jika terjadi, maka fungsi distribusi yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik. Islam mengakui kebebasan individu, tetapi Islam tidak menghendaki jika kebebasan tersebut melanggar hak individu orang lain. Tindakan pelanggaran terhadap hak orang lain tidak dihendaki dalam syariah. Pelanggaran tersebut antara lain kegiatan penimbunan barang, penimbunan uang, penetapan harga jual tinggi, permainan takaran dan timbangan di pasar, tindakan monopoli, dan tindakan lainnya yang mengutamakan kepentingan pribadi.

2. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Pemerintah tidak dapat mencapai tujuan kecuali pemerintah menetapkan standar publik untuk kebutuhan dasar minimum, sehingga negara tidak bisa mengontrol apakah kebijakannya berhasil atau tidak. Adanya standar akan memudahkan pemerintah untuk mengelompokkan dan klasifikasikan berdasarkan tingkat standar yang telah ditetapkan pemerintah. Adanya tingkat standar tersebut bukan untuk diskriminasi, namun berfungsi untuk mempermudah treatment seperti apa yang harus diterapkan, agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan kesejahteraan secara adil. Jika pemerintah tidak menetapkan standar kebutuhan hidup minimum

masyarakat, maka pemerintah tidak akan memiliki orientasi yang jelas dalam menjalankan kebijakan distribusi dan pengentasan kemiskinan. Standar kebutuhan hidup minimum ini, dalam perspektif Islam, standar hidup minimum bukan hanya kebutuhan material saja. Standar tersebut meliputi kebutuhan spiritual dan sosial lainnya, misalnya standar kecukupan jumlah sekolah dan fasilitas ibadah minimal dalam suatu daerah.

3. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Fungsi distribusi pemerintah secara material adalah bertujuan utama untuk menghapus terjadinya konsentrasi dan eksploitasi kekayaan oleh segelintir atau sebagian orang. Negara dapat secara langsung melakukan intervensi dan mengatur distribusi sumber daya dan kekayaannya. Intervensi langsung terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada anggaran pendapatan, pemerintah dapat menargetkan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada sisi belanja negara, pemerintah harus mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan syariah. Pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara misalnya pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat merasakan manfaat yang adil.
4. Kebijakan yang memprioritaskan sektor riil dan melarang penggunaan suku bunga. Pemerintah harus memerangi

penggunaan suku bunga dan lebih memprioritaskan sektor riil. Jika suku bunga masih diterapkan dalam perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Perekonomian akan diwarnai dengan tindakan spekulatif. Dampak negatif penggunaan suku bunga adalah ketidakstabilan nilai mata uang akibat inflasi.

C. Fungsi Stabilisasi

Stabilitas adalah keadaan sosial-ekonomi di mana risiko diminimalkan dan masyarakat dapat yakin terhadap pertumbuhan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi saat ini dan masa depan, interaksi sosial yang harmonis dan dinamis, namun Kepastian sepenuhnya merupakan hak Allah SWT. Tujuan stabilitas sosial adalah menciptakan interaksi sosial yang dinamis dan harmonis sehingga setiap individu dapat bermental kuat, sukses, dan menikmati kehidupan sosial yang adil. Tujuan stabilitas ekonomi adalah menciptakan tingkat kemakmuran yang tinggi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya.¹⁷

Stabilitas yang harus dijaga dalam konsep Islam mencakup tujuan stabilitas nilai mata uang, harga, penyediaan barang dan jasa, atau lebih tepatnya stabilitas harga, namun

¹⁷ Abdul Rahman Suleman and Abdurrozzaq Hasibuan, 'Kajian Terhadap Fungsi Anggaran Dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Daerah', *Riset Manajemen & Bisnis*, 3.1 (2018), 17–23.(19)

perlakuannya berada pada ranah tersendiri. Meskipun pengendalian stabilitas nilai mata uang menitikberatkan pada kebijakan moneter, namun dalam konsep ekonomi syariah pengendalian stabilitas nilai mata uang tetap perlu didasarkan pada situasi sektor riil. Harga merupakan efek dari stabilitas nilai mata uang dan terganggunya pasokan barang dan jasa.

Jumlah uang beredar dapat disesuaikan dengan kebijakan fiskal. Dari perspektif ekonomi Islam, jumlah uang beredar cenderung tetap dalam jangka pendek. Peningkatan jumlah uang beredar didasarkan pada perkembangan sektor riil. Oleh karena itu, tugas utama sektor keuangan adalah mengendalikan peredaran uang dalam perekonomian.¹⁸

Pada prinsipnya, untuk menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah harus mengendalikan pasokan barang dan jasa di pasar baik melalui kebijakan produksi maupun *impor* dan *ekspor*. Ketika pasokan barang dan jasa berada pada tingkat aman dalam jangka pendek dan panjang, maka nilai suatu mata uang dan stabilitas harga relatif mudah dikendalikan. Karena negara tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, *fluktuasi* harga dan nilai mata uang di pasar relatif kecil.

¹⁸ Paulina Y Amtiran, 'Pengelolaan Keuangan Negara', *Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's)*, 12.2 (2020), 203–14.(h.207)